

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

## *Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;
- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas

Implementasi kebijakan dan program kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah; (2) Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas; serta (3) Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan permasalahan diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Luwu Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021 - 2026.

Sebagaimana Visi Bupati Luwu Timur, yaitu : **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**,. Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul, menerapkan nilai-nilai budaya , dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sarana prasarana yang baik, berkualitas dan berteknologi tinggi, masyarakatnya makmur, tersedianya lapangan pekerjaan, terhapusnya kemiskinan dan profesionalisme aparatur. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan misi yang ke-1 yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

. Misi ini diarahkan untuk **mencapai kesejahteraan sosial** meningkatnya taraf hidup masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Renja Dinsos P3A Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pencapaian Kesejahteraan Sosial. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Perangkat Daerah, dan tahapan Musrenbang guna merumuskan perencanaan tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 103

10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinsos P3A Tahun 2023;

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun seperti berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB. II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD Dinsos P3A. Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) melaksanakan 11 program dan 20 kegiatan serta 38 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,209.507,318 atau 96,91 % dari total anggaran sebesar Rp. 10.535.158,231 yang terdiri atas realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 9.522.673.294 atau sebesar 96,82% dari pagu anggaran dan belanja Modal sebesar Rp. 686.834.024 atau sebesar 98,19 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 699.453.600,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinsos P3A pada tahun 2021 dapat disajikan pada table 01 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) sebagai berikut :

**Tabel 01 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020 (n-2)			Target Program dan kegiatan 2021 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2022		SKPD pelaksana
					Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>	100	96,80	100	94.25	94,25	100	100	100	Dinsos P3A
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	100	100	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	2	100.00	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2	2	2	100.00	3	2	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	10	10	10	100.00	10	10	100	
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja adminsitrase keuangan peranglat daerah</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	20	21	21	21	100.00	21	20	100	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Smesteraan SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16	16	16	16	100	16	16	100	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10	10	10	10	100.00	10	10	100	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	7	7	7	7	100.00	7	7	100.00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1	1	1	1	100.00	1	1	100	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	5	5	100	5	5	100	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan (Eksamplar)	60	60	60	60	100	60	60	100.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makan dan minum tamu dan pegawai (orang)	110	110	110	110	100	110	110	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan (kali)	415	405	400	411	100	415	415	100	
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>98</b>	
	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan (jenis)	0	0	0	0	0	0	1	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan (jenis)	0	0	0	0	0	0	1	100	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1250	1200	1200	1333	111	1250	1250	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48	36	36	36	<b>100.00</b>	48	48	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3	11	3	3	100.00	3	100	100	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11	11	11	11	100.00	11	11	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	42	37	37	37	<b>100.00</b>	37	42	<b>100</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	<b>100</b>	1	1	<b>100</b>	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang diberikan Bantuan Sosial</b>	<b>43,93</b>	<b>0,78</b>	<b>0,80</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>39,74</b>	43,78	<b>100</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Prosentase Panti social yang menerima program</b>	20	15	13.5	13.5	<b>100</b>	13,5	17,5	<b>100</b>	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

Kabupaten/Kota	pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya										
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40	24	24	24	100	27	57	100		
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)</b>	100	100	100	100	100.00	100	100	100		
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (orang)</b>	100	100	100	100	100	100	100	144.49		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	70	50	50	50	100.00	50	70	100		

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2	2	2	1	50	1	2	100	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	100	70	90	90	100.00	95	95	100.00	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	90	70	90	90	100.00	95	100	100	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang miskin yang divalidasi (jiwa)	26123	26023	26073	26073	100.00	26023	100	100	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial PKH (KK)	9000	7500	7500	7238	96.50	9000	9017	100	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)</b>	100	100	100	100	<b>100.00</b>	100	100	<b>100</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	100	100	100	100	<b>100.00</b>	100	100	<b>100</b>	
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan makanan (jiwa)	250	150	150	151	<b>100</b>	150	254	<b>100</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	100	100	100	100	<b>100.00</b>	100	100	<b>100</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	3	3	3	3	<b>100.00</b>	3	100	<b>100</b>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3	3	3	3	100.00	3	100	100	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH</b>	74,69	76	75	76,8	100.00	76.02	76,02	100	
		<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	23,29	24	25	23,20	92,8	23.98	23,98	<b>100</b>	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	7	6	7	7	100	7	7	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41	39	39	39	100.00	39	41	100	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD</b>	3	2	2	2	100.00	3	3	100	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	180	64	64	64	100.00	64	95	83	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41	39	39	39	100.00	39	41	100	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	81,82	70	72,73	72	100	72,73	81.82	100	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	13	9	10	10	<b>100.00</b>	10	13	<b>100</b>	
	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang mengikuti rapat kordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60	60	60	60	<b>100.00</b>	60	60	<b>100</b>	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	3	0	0	0	<b>0</b>	0	10	<b>100</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	3	0	0	0	<b>0</b>	0	10	<b>100</b>	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	13	9	10	10	<b>100.00</b>	10	13	<b>100</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40	40	40	40	<b>100</b>	40	40	<b>100</b>	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	0,11	0.7	0,7	0,7	<b>100</b>	0,7	0,9	<b>100</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)</b>	50	50	50	50	<b>100</b>	50	59	<b>100</b>	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50	50	50	50	<b>100</b>	50	50	<b>100</b>	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	1	1	1	1	<b>100</b>	1	1	<b>100</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen )	1	1	1	1	<b>100</b>	1	1	<b>100</b>	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100	<b>100</b>	
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	1	1	1	1	<b>100</b>	1	1	<b>100</b>	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1	1	1	1	100	1	1	100	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	1	1	1	1	100	1	1	100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1	1	1	1	100	1	1	100	

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2019 dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2020 lampiran Tabel 1 (**Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) dari 20 (dua puluh ) kegiatan yang dilaksanakan, semua memenuhi target yang ditetapkan. Dengan rincian sebagai berikut :

Apabila dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA pada tahun 2019 terdapat 11 program dan 20 Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2019 terealisasi pada masing-masing kegiatan sebanyak 100 % seperti terlihat pada tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) diatas.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap Kesejahteraan sosial.

Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan penyusunan dan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur terlihat masih banyak permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu:

### **Bidang Sosial**

Di Kabupaten Luwu Timur, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Sesuai dengan misi pertama Bupati Luwu Timur untuk **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan; maka Dinas Sosial P3A sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial memiliki Misi keterkaitan yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bantuan, bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga sosial, kelompok rentan, dan korban bencana serta upaya memperkecil kesenjangan sosial;
2. Meningkatkan usia hidup, harkat martabat serta kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

### **Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak**

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka kriminalitas yaitu rasio kekerasan di dalam rumah tangga. Karena adanya kekerasan pada perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga termasuk di dalam tindak kriminal. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan dan menangani permasalahan Perempuan dan Anak untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka perlu :

- a. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang dilatih tentang pengarusutamaan gender (penyusunan data terpilah untuk profil gender);
- b. Peningkatan Jumlah kelompok organisasi perempuan yang memahami data terpilah untuk penyusunan profil gender;
- c. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. Peningkatan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit;
- e. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- f. Peningkatan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;

- g. Peningkatan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

**TABEL 02 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KAB. LUWU TIMUR**

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	38,62	43,28	43,43	43,65	43,79	54,21	66,42	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,76	50,77	50,78	50,79	50,81	50,76	50,76	
3	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,04	0,036	0,020	0,014	0,013	0,04	0,02	
4	Prosentase kekerasan terhadap Anak	0,022	0,020	0,017	0,016	0,015	0,01	0,01	
5	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	

Jika dilihat Tabel 2 (**Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017**) di atas, hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keberhasilan pencapaian yang dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program-program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial dengan cara mengukur berapa persen jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2021 target Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial adalah 38,62 %. Realisasi capaian di tahun 2021 adalah sebesar 54,21. Hal ini berarti penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Luwu Timur telah melebihi target. Angka tersebut diperoleh dari  $((\text{Jumlah PMKS yang ditangani} / \text{Jumlah PMKS yang ada}) \times 100\%)$ . Hal itu didukung oleh program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diperoleh berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur masih berada pada posisi 50,76 poin.

Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan diperoleh melalui  $(\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komprehensif} / \text{Jumlah Rumah Tangga}) \times 100\%$  sedangkan Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh  $(\text{Jumlah kasus kekerasan}$

terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 26 kasus /dibagi Jumlah rumah tangga sebanyak 70.198 ruta sehingga memperoleh perhitungan sebesar 0,04 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah factor ekonomi dan perselingkuhan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 13 kasus dengan jumlah anak sebanyak 116.961 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,01 persen. Kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan penyebab yang hamper sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu factor ekonomi.

Indikator : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya x 100%). Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 254 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 254 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen.

indikator ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah*** diperoleh dari hasil (Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten X jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) Jumlah total capaian program penunjang 14,29 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 100 %

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021-2022, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah social masih tergantung dari bantuan. Dalam menangani urusan social terutama pada penyandang masalah kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sector. Adanya pendataan berbasis system informasi teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

b. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman uokum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat . Oleh karenanya Dinas Sosial P3a Kabupaten Luwu Timur melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari factor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Luwu Timur Kabupaten Layak Anak serta mengupayakan pembentukan UPTD Penanganan Korban Kekerasan.

### 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 disajikan pada tableberikut: :

**TABEL 03 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)**

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	-2	3	4	5	-6	7	8	-9	-10	-11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>4.577.300.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase rata-rata capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>3.717.983.314</b>	
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>115.500.000</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>120.056.196</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	52.869.428	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6.119.180	

## Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	5.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.517.040	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	57.550,548	
<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,741,000,000</b>	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.786.322.468</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	21 org	2,671.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	22 org	2.709.642.468	
Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		70.000.000	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		76.600.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>114.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	SKPD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	66 stell	44.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	SKPD	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	0	

## Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	5 orang	59.830.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>478.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>458.205.650</b>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.500,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 jenis	15.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	9	0
Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	30.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.102.150
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 jenis	14.210.000
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000,00

## Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	8.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 ORANG	7.250.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	393.796.0000	
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>775.800.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan dinas operasional/lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	0	0	
	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	4 jenis	158.000.000	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	
	Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	SKPD-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Jenis	70.000.000	Pengadan Peralatan dan mesin lainnya	MALILI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	0	0	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	320.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	0	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 jenis	20.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	0	0	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>128.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>109.310.000</b>	

## Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

			<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	SKPD	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1200 nomor	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah surat keluar dan surat masuk yang digendakan	1250 nomor	2.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	75.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58,560.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	51.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	48.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>215.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>184.259.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	125.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	104.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	30.850.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	2 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	49.000.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	43,78%	4.000.000.000	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	43,28%	3.291.105.576	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	20%	4.000.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	17.5%	3.291.105.576	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40 kelompok	4.000.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95 kelompok	3,291.105.576	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Ana</b>	100%	1.250.000.000	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Ana</b>	100%	1.085.903.675	

			<b>k Terlantar,Lanj ut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)</b>				<b>k Terlantar,Lanj ut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)(%)</b>			
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kabupa ten Luwu Timur	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)</b>	100	1.250.000.000	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kabupa ten Luwu Timur	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi (persen)</b>	100	162.745.000

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (orang)	100 orang	75.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, pengemis gelandangan, penyandang penyakit sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang diberikan bimbingan sosial (orang)	95 orang	152.745.000	
	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	975.000.000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	60 orang	841.928.675	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	3 kali	200.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan (kali)	2 kali	81.230.000	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	8,36%	670.000.000	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	8,36%	407.536.200	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	1 dokumen	670.000.000	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	1 dokumen	407.536.200	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26.123	350.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	31997	157.538100	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Luwu Timur	jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	320.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000	249.998.100	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi</b>	100	385.000.000	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi</b>	100	205.529.490	

			<b>Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>					<b>Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	100 %	320.000.000	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	100 %	205.529.490	
	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 jiwa	320.000.000	Penyediaan Makanan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 jiwa	205.529.490	
	<b>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan</b>	Kabupaten Luwu timur	<b>Jumlah Tagana yang dibina</b>	70 orang	65.000.000	<b>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan</b>	Kabupaten Luwu timur	<b>Jumlah Tagana yang dibina</b>	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	<b>bencana kabupaten/kota</b>					<b>bencana kabupaten/kota</b>					
	Kordinasi, sosialisasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	70 orang	65.000.000	Kordinasi, sosialisasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina	0	0	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>119.880.000</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit</b>	<b>105.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit</b>	<b>119.880.000</b>	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	105.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kec. Malili, Wotu, Mangkutana	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	119.880.000	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	<b>75,25</b>	<b>541.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b>	<b>75,25</b>	<b>173.469.120</b>	
		Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>24,75</b>			Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>24,75</b>		

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	7	130.000.000	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	7	82.260.717	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	39 opd	130.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	41 opd	82.260.717	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	2	411.000.000	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	2	91.208.403	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	180 orang	266.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	95 orang	19.881.053	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	39 klpok	145.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41 klpok	71.327.350	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	570.000.000	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	72,73	526.831.245	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	11 orang	60.000.000	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	11 orang	122.954.026	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	122.954.026	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>11 orang</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>11 orang</b>	<b>403.877.219</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	450.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	40 orang	403.877.219	
	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>5 jenis</b>	<b>60.000.000</b>	<b>Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	5 jenis	60.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	0,9	160.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga</b>	0,9	72.681.600	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	50 orang	60.000.689	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)</b>	50 orang	72.681.600	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	160.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	72.681.600	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	100 %	35.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota</b>	100%	40.775.350	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	1 dokumen	35.000.000	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	1 dokumen	40.775.350	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1 dokumen	35.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah data gender yang diolah (dokumen )	1 dokumen	40.775.350	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kabupaten Luwu Timur</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kabupaten Luwu Timur</b>	<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>139.384.630</b>	
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1</b>	<b>54.394.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	54.394.000	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	1	200.000.000	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	1	85.000.630	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	200.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	85.000.630	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSU ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO</b>	100	135.000.000	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSU ANAK</b>	Kabupaten Luwu Timur	<b>Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO</b>	0	0	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota	Kabupaten Luwu timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	4 kasus	135.000.000	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota	Kabupaten Luwu timur	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh	0	0	

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023*

	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	40 orang	135.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0	0	
					<b>12.928.300.000</b>						<b>9.781.080.200</b>

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2023 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Namun ada beberapa usulan yang masuk berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yaitu Bantuan Sosial kepada Kwelompok Usaha Bersama (Kube) Keluarga Miskin di Wilayah Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur .

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti pada table 04 ( **Tabel T-C. 32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017**) berikut ini :

Tabel 04. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi		Kinerja	Indikator	Volume	Besaran/	Catatan
1	2						5	6
I	Program Pemberdayaan sosial							
	Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kecamatan Wotu :	6	kelompok kube		Rp 150.000.000	
		2	Kecamatan Mangkutana, :	2	kelompok kube	25,000,000	50.000.000	
		3	Kecamatan Wasuponda :	2	kelompok kube		50.000.000	
		4	Kecamatan Towuti :	28	kelompok kube		700,000,000	
	<b>JUMLAH</b>			<b>38</b>	<b>kelompok kube</b>		<b>Rp 950,000,000</b>	

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

### **BAB III.**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dengan tema “ **Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan infrastruktur Daerah dan Pemenuhan Layanan dasar** “

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Penguatan konektivitas dan Pemerataan;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja;
4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup ; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dengan tema “**Inovasi Pemanfaatan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi**” dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 meliputi :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing;

1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pembangunan;

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi;
3. Percepatan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat;
4. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan;
5. Pemantapan reformasi birokrasi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan Kab. Luwu Timur Tahun 2021 ditetapkan Tema pembangunan “**Pemantapan Kemajuan dan Kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi**”. Berdasarkan tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pengembangan masyarakat religius dan kerukunan umat beragama;
3. Penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
5. Pembangunan dan pelayanan kesehatan

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2023 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tujuan yakni ***Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah tahun 2021-2026 adalah : **1). Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2). Meningkatnya pemberdayaan perempuan; 3). Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4). Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan social; 5). Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table 05..

Tabel. 05. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2023
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin	80,83 %
		Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,43%
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,78
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,03%
			Prosentase Kekerasan terhadap anak	0,017%
		Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100%
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan

dan keuangan tahun 2023 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kodefikasi Nomenklatur menjadi alat untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Penyusunan tersebut dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur telah melakukan pemetaan (mapping) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur renja tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 06. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				8.827.938.255	APBD			11.184.275.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				8.827.938.255	APBD			11.184.275.000
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>3.717.983.314</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>4.614.275.000</b>

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>120.056.196</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>115.500.000</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	52.869.428	APBD		2 dokumen	40.000.000
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD, MALILI	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6.119.180	APBD		2 dokumen	10.000.000
					Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3.517.040	APBD		2 dokumen	5.500.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	57.550,548	APBD		10 dokumen	60.000.000
					<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitrasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.786.322.468</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>2.807.775.000</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	21 orang	2.709.642.468	APBD		21 orang	2.737.775.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Smesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	76.600.000	APBD		16 dokumen	70.000.000
					<b>Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	APBD		<b>0%</b>	<b>0</b>
					Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	0	0	APBD		0	0
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.830.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>70.000.000</b>
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	0	0	APBD		0	0
					Pendataan dan pengolahan adminsitrasi kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	0	0	APBD		0	0

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	59.830.000	APBD		10 orang	70.000.000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>458.205.650</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>463.000.000</b>
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor		Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.500	APBD		7 jenis	3.500.000
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	0	0	APBD		0	0
				Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.102.150	APBD		1 jenis	30.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	14.210.000	APBD		5 jenis	15.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000,00	APBD		60 eksamplar	6.500.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 orang	7.250.000,00	APBD		110 orang	8.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	MALILI	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	393.796.0000	APBD		410 kali	400.000.000
				<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	APBD		<b>0</b>	<b>0</b>
				Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0	APBD		0	0
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	0	0	APBD		0	0
				Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	APBD		0	0

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan	0%	0	APBD		0	0
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kanto atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	0	0	APBD		0	0
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>109.310.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>128.000.000</b>
					Penyediaan Jasa Surat menyurat	Skpd	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	2.750.000	APBD		1200 nomor	2.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58,560.000	APBD		48 rekening	75.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang/bln	48.000.000	APBD		3 orang/bln	51.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>184.259.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	104.400.000	APBD		11 unit	125.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	42 unit	30.850.000	APBD		37 unit	35.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	49.000.000	APBD		1 unit	60.000.000
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kab.Lu wu Timur</b>	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial</b>	<b>43,93</b>	<b>3.291.105.576</b>	APBD		<b>44,14</b>	<b>4.000.000.000</b>



*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

						<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar</b>	<b>100</b>	<b>162.745.000</b>	APBD		<b>100</b>	<b>1.260.000.000</b>
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	100 orang	152.745.000	APBD		85 orang	75.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					Penyediaan Permakanan	Kab.Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	70 orang	841.928.675	APBD		80 orang	985.000.000
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Luwu Timur	Jumlah bimbingan fisik, mental dan sporotual yang dilaksanakan	2 kali	81.230.000	APBD		3 kali	200.000.000
					<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Luwu Timur	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang)	0	0	0		0	0
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	100%	407.536.200	APBD		100%	<b>670.000.000</b>
				<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	90 orang	407.536.200	APBD		60 orang	<b>670.000.000</b>
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26123	157.538100	APBD		26073	350.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 KK	249.998.100	APBD		9000 KK	320.000.000
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>205.529.490</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>385.000.000</b>
				<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>205.529.490</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>320.000.000</b>
				Penyediaan Makanan	Kab.Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 orang	205.529.490	APBD		200 orang	320.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				<b>Penyelenggaraan PEMBERDAYAAN Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah tagana yang dibina (orang)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>70 orang</b>	<b>65.000.000</b>
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	0	0	0		70 orang	65.000.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>119.880.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>
				<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit lokasi</b>	<b>119.880.000</b>	APBD		<b>3 unit lokasi</b>	<b>105.000.000</b>
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit lokasi	119.880.000	APBD		3 unit lokasi	105.000.000
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>953.141,945</b>	APBD			<b>1,553,000.000</b>
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>953,141,945</b>	APBD			<b>1,553,000.000</b>

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH</b>	<b>74,69%</b>	<b>177.151.665</b>	APBD		<b>75,25%</b>	<b>438.000.000</b>
						<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>25,31%</b>				<b>24,75%</b>	
				<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	<b>7 syarat</b>	<b>82.260.717</b>	APBD		<b>7 syarat</b>	<b>130.000.000</b>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	41 OPD	82.260.717	APBD	41	39 OPD	130.000.000
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah perencana /calon fasilitator/auditor yang terlatih teknik PPRG	0	0	0		0	0

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kursi di DPRD yang diduduki perempuan</b>	<b>3 orang</b>	<b>91.208.403</b>	APBD		<b>3 orang</b>	<b>308.000.000</b>
					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	19.881.053	APBD		180 orang	163.000.000
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41	71.327.350	APBD		39	145.000.000
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	81,82 %	<b>526.831.245</b>	APBD		81,82 %	<b>570.000.000</b>

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpaduh</b>	<b>11 kasus</b>	<b>122.954.026</b>	<b>APBD</b>		<b>11 kasus</b>	<b>60.000.000</b>
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	122.954.026	APBD		60 orang	60.000.000
					<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>11 orang</b>	<b>403.877.219</b>	APBD		<b>11 orang</b>	<b>450.000.000</b>
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan ( orang)	50	403.877.219	APBD		50	450.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	APBD		<b>0</b>	<b>0</b>
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	APBD		0	0
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)</b>	<b>0,11</b>	<b>72.681.600</b>	APBD		<b>0,11</b>	<b>160.000.000</b>
				<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah masyarakat yang diberiikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	<b>72.681.600</b>	APBD		<b>50 orang</b>	<b>160.000.000</b>
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang diberiikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	50 orang	72.681.600	APBD		50 orang	160.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)</b>	100	40.775.350	APBD		100	35.000.000
				<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	40.775.350	APBD		<b>1 dokumen</b>	35.000.000
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen )	1 dokumen	40.775.350	APBD		1 dokumen	35.000.000
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	139.384.630	APBD		<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>
				<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1 kali</b>	54.394.000	APBD		<b>1 kali</b>	<b>150.000.000</b>
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan		Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	54.394.000	APBD		1 kali	150.000.000

*Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021*

				Kabupaten/Kota						
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>85.000.630</b>	APBD	<b>1 lembaga</b>	<b>200.000.000</b>
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	85.000.630	APBD	1 lembaga	200.000.000
				<b>TOTAL</b>			<b>9.781.080.200</b>			<b>12.737.275.000</b>

**BAB IV.**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P3A) direncanakan melaksanakan 11 program, 20 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. **9.731.080.200,-**. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 07.**

**ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL P3A KAB. LUWU TIMUR  
TAHUN 2023**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (N)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>9.877.941.313</b>	APBD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>9.877.941.313</b>	APBD
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>3.717.988,608</b>	APBD

	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	SKPD	<b>Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>120.054.680</b>	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	52.869380	APBD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	SKPD, MALILI	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6.119.000	APBD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	3,516,800	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	57.549.500	APBD
	<b>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja adminsitiasi keuangan peranglat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.786730.918</b>	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	21 orang	2.710.050.918	APBD
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Smesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	16 dokumen	76.680.000	APBD

	<b>Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	APBD
	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	0	0	APBD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.530.000</b>	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang diadakan	0	0	APBD
	Pendataan dan pengolahan adminsitasi kepegawaian	SKPD	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutahirkan	0	0	APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	10 orang	59.530.000	APBD
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase rata-rata cpaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>450.530.850</b>	APBD

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor		Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan	7 jenis	3.307.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	0	0	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 jenis	33.099.010	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	14.210.000	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan	60 eksamplar	6.540.000	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	110 orang	7.250.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	MALILI	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	410 kali	393.706.000	APBD
	<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0	APBD

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	0%	0	APBD
	Pengadaan mebel	SKPD	Jumlah mebel yang diadakan	0	0	APBD
	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan	0%	0	APBD
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kanto atau bangunan lainnya	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	0	0	APBD
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>109,310,000</b>	APBD
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Skpd	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	2.750.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	58.560.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	SKPD	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang/bln	48.000.000	APBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>SKPD</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>184.251.000</b>	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ( unit)	11 unit	104.400.000	APBD

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis )	37 unit	30.850.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	49.001.000	APBD
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial</b>	<b>43,93</b>	<b>3,241,104.080</b>	APBD
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya</b>	<b>20%</b>	<b>3.241.104.080</b>	APBD
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah sumber kesejahteraan social masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	40	3.241.104.080	APBD
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1085.903.525</b>	APBD

	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar</b>	<b>100</b>	<b>1.017.095.485</b>	APBD
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<b>Kab.Luwu Timur</b>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	100 orang	162.745.000	APBD
	Penyediaan Permakanan	Kab.Luwu Timur	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	80 orang	841.928.525	APBD
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Luwu Timur	Jumlah bimbingan fisik, mental dan spiritual yang dilaksanakan	2 kali	81.230.000	APBD

	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Kab.L uwu Timur</b>	<b>Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban TindakKekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Kab.L uwu Timur</b>	<b>Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Lu wu Timur	Jumlah warga migran tindak kekerasan yang ditangani (orang)	0	0	0
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kab.L uwu Timur</b>	<b>Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)</b>	<b>100%</b>	<b>407.536.200</b>	<b>APBD</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.L uwu Timur</b>	<b>Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM</b>	<b>100 orang</b>	<b>407.536.200</b>	<b>APBD</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lu wu Timur	Jumlah fakir miskin yang didata (KK)	26123	157.536.100	APBD

	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Luwu Timur	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 KK	249.998.100	APBD
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>205,528.900</b>	APBD
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat</b>	<b>100%</b>	<b>205.528.900</b>	APBD
	Penyediaan Makanan	Kab.Luwu Timur	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 orang	205.528.900	APBD
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah tagana yang dibina (orang)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang)	0	0	0
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>119.880.000</b>	APBD

	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Luwu Timur</b>	<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)</b>	<b>3 unit lokasi</b>	<b>119.880.000</b>	APBD
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Luwu Timur	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit lokasi	119.880.000	APBD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>953.138.887</b>	APBD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>953.138.887</b>	APBD
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga PEMERINTAH</b>	<b>74,69%</b>	<b>173,466,406</b>	APBD
			<b>Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta</b>	<b>25,31%</b>		
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi</b>	<b>7 syarat</b>	<b>82.259,746</b>	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah SKPD yang mengimplmentasikan prasarat PUG (OPD)	41 OPD	82.259.746	APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten, SKPD	Jumlah perencana /calon fasilitator/auditor yang terlatih teknik PPRG	0	0	0

	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan</b>	<b>3 orang</b>	<b>91.206.660</b>	APBD
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	114 orang	19.879.560	APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41	71.327.100	APBD
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu</b>	81,82 %	<b>526.831,211</b>	APBD
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu</b>	<b>13 kasus</b>	<b>122.953.992</b>	<b>APBD</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	122.953.992	APBD
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>13 orang</b>	<b>403.877.219</b>	APBD
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40	403.877.219	APBD
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	0	0	APBD
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)</b>	<b>0,11</b>	<b>72.681.570</b>	APBD

	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)</b>	<b>50 orang</b>	<b>72.681.570</b>	APBD
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang diberikan pengembangan dalam hal peningkatan kualitas keluarga (orang)	50 orang	72681.570	APBD
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>		<b>Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)</b>	100	<b>40.775.100</b>	APBD
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah data gender yang diolah (dokumen )</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>40.775.100</b>	APBD
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen )	1 dokumen	40.775.100	APBD
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Prosentase indikator KLA yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>139.384.600</b>	APBD
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)</b>	<b>1 kali</b>	<b>54.384.000</b>	APBD

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	54.384.000	APBD
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)</b>	<b>1 lembaga</b>	<b>85.000.600</b>	APBD
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten ( lembaga)	1 lembaga	85.000.600	APBD
	<b>TOTAL</b>				<b>9.731.080.200</b>	

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 11 program, 20 kegiatandan 36 sub kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Renja Tahun 2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2023. Kesiapan sumber

daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2021-2026 (target di tahun 2023-nya).

Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Oktober 2022

**KEPALA DINAS,**

**Drs. SUKARTI**

Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP. 19650210193031015